

BAB IV

PERTIMBANGAN ARAB SAUDI MELAKUKAN PERANG PROKSI TERHADAP IRAN DI KONFLIK SURIAH

Bab keempat dari tulisan ini menyajikan pertimbangan mengapa Arab Saudi memilih melakukan perang proksi terhadap Iran di Konflik Suriah dan penjelasan mengenai keuntungan serta biaya perang proksi dalam upaya Arab Saudi mencapai tujuan strategisnya yaitu hegemoni kawasan Timur Tengah.

A. Hegemoni Kawasan Timur Tengah

Hubungan Arab Saudi dan Iran senantiasa diwarnai persaingan untuk memperebutkan hegemoni kawasan Timur Tengah. Keduanya sama-sama berusaha meningkatkan pengaruhnya masing-masing di lingkup regional. Pada prosesnya, pertikaian kedua negara seringkali tidak diwujudkan dalam bentuk perang konvensional, melainkan melalui perang proksi. Arab Saudi-Iran memilih menggunakan perpanjangan tangan pada konflik-konflik tertentu seperti Perang Saudara Yaman. Namun, pada Konflik Suriah, Iran jelas tidak hanya memanfaatkan proksinya. Nyatanya, tentara Iran sudah memasuki medan perang dan terlibat secara langsung ke dalam konflik. Di lain pihak, Arab Saudi masih menahan diri untuk mengirim pasukannya langsung ke medan perang. Sejauh ini, rencana pengiriman pasukan dari Arab Saudi hanya sebatas ucapan-ucapan.

Raja Muhammad bin Salman al-Saud merumuskan arah kebijakan Arab Saudi ke dalam 3 tujuan strategis; memperkuat militer, mengevaluasi aliansi, dan secara agresif menahan ekspansi kekuatan Iran dalam rangka meraih hegemoni kawasan termasuk persaingan keduanya di Konflik Suriah.

Dari 3 tujuan strategis tadi, penulis memfokuskan pembahasan pada sub-bab ini lebih kepada tujuan ketiga. Pada awal pemerintahan Raja Salman, Arab Saudi diterpa berbagai permasalahan yang menghambatnya meraih hegemoni kawasan. Gejolak politik terjadi di dalam negara ditambah serangkaian kemunduran di bidang ekonomi. Harga minyak dunia anjlok dan memaksa pemerintah melakukan pemutusan hubungan kerja kepada puluhan ribu karyawan. Pemutusan hubungan kerja tadi memicu keresahan yang sebelumnya tidak pernah terjadi di kerajaan, akhirnya para pekerja melakukan tindakan anarkis dengan membakar bis-bis di kota suci Mekkah (Dorsey, 2016). Banyak pihak kemudian meragukan Arab Saudi mampu menjadi kekuatan hegemoni di kawasan Timur Tengah terlebih kerajaan harus bersaing dengan Iran. Situasi ini diperparah dengan perubahan sikap Amerika Serikat terhadap Timur Tengah pada umumnya dan Arab Saudi pada khususnya. Hubungan kedua negara semakin dingin akibat pernyataan-pernyataan dari pejabat-pejabat Amerika Serikat yang menegaskan bahwa Amerika Serikat dan Arab Saudi tidak memiliki nilai-nilai bersama melainkan hanya kepentingan yang kebetulan sama (Dorsey, 2016).

Disisi lain, Iran menjelma menjadi kekuatan baru di kawasan Timur Tengah. Negara-negara tetangga melihat Iran sebagai sesuatu yang berbeda atau tidak biasa di dunia Islam lantaran budaya Iran bukan budaya Arab. Berbicara tentang budaya, Iran memiliki sejarah panjang sebagai bangsa Persia yang berbicara dengan bahasa Persia, padahal masyarakat muslim di Timur Tengah identik dengan bahasa Arab. Perbedaan-perbedaan tadi ditambah fakta bahwa mayoritas muslim di Iran merupakan Syiah membuat negara-negara Teluk, khususnya Arab Saudi menganggap Iran bukan bagian dari Dunia Arab (Gengler, 2017).

Perang Iran-Irak tahun 1980 menyeret Iran ke situasi yang sulit karena negara-negara Teluk lebih memilih mendukung

Irak. Situasi ini sangat tidak menguntungkan bagi Iran, terlebih Iran juga harus mendapat sanksi ekonomi, perdagangan, pengembangan ilmu pengetahuan, sekaligus militer dari Amerika Serikat dan sekutunya (U.S. Department of State, t.thn.).

Semua negara berusaha menekan Iran, tidak terkecuali negara di kawasan Timur Tengah. Oleh karena itu, bagi Iran, mencari sekutu sebanyak-banyaknya menjadi sangat penting. Iran perlu meningkatkan hegemoninya di kawasan agar dapat mempertahankan sekutu dan menjaga mereka. Suriah sebagai sekutu Iran memiliki peran penting untuk mempertahankan keamanan nasional Iran dari serangan-serangan luar melalui pakta pertahanan mereka, karena itulah Iran akan menjaga mati-matian rezim pemerintahan Presiden Bashar al-Assad.

Arab Saudi dihadapkan pada dua pilihan dalam menyikapi Konflik Suriah. Mengikuti jejak Iran dengan turun langsung ke dalam konflik atau memanfaatkan potensi kelompok-kelompok pemberontak pribumi yang secara langsung beroperasi di titik vital Konflik Suriah, dengan kata lain melakukan perang proksi. Mengacu kepada Andrew Mumford, perang proksi adalah konflik dimana pihak ketiga mengintervensi secara tidak langsung ke dalam konflik melalui perpanjangan tangan dengan maksud untuk memengaruhi hasil konflik tersebut agar sesuai dengan tujuan strategis pihak ketiga (Mumford, 2013). Perang proksi sama dengan intervensi militer—upaya untuk memengaruhi urusan negara lain melalui tindak kekerasan. Hanya saja, perang proksi tidak melibatkan aktor utama, yaitu pihak ketiga secara langsung di medan perang. Pertempuran dilakukan oleh aktor-aktor pribumi atau dengan kata lain perpanjangan tangan pihak ketiga (Groh, 2010, hal. 4). Hubungan antara negara pihak ketiga dan proksinya bersifat hierarki; proksi tunduk kepada kepentingan pihak ketiga karena ketidakmampuannya berperang sendiri. Tapi, bukan berarti proksi tidak memiliki kepentingannya sendiri.

Pada Konflik Suriah, alasan mengapa Arab Saudi melakukan perang proksi di konflik tersebut dikarenakan; Pertama, Arab Saudi menganggap dirinya sebagai pemimpin Dunia Arab terkhususnya Islam. Di negara ini lah dua kota suci umat muslim, yaitu Mekkah dan Madinah bertempat. Secara geografis, runtuhnya Turki Ottoman menjadikan Arab Saudi pusat peradaban Islam modern. Mengutip kembali Kebijakan luar negeri Arab Saudi pada bab-bab sebelumnya, ada empat pilar utama. Antara lain, Integritas wilayah, perlindungan rezim, kemakmuran ekonomi, dan promosi serta pelestarian bentuk pemerintahan monarki Islam (Deen, 2017). Bagi Arab Saudi melestarikan bentuk pemerintahan monarki Islam adalah prioritas, karena negara-negara muslim lainnya menjadikan Arab Saudi sebagai pedoman mereka dalam menjalankan syariat Islam. Tapi, kebangkitan Iran melahirkan bentuk baru negara Islam modern versi mereka yang menyimpang dari nilai-nilai konservatif Islam selama ini. Timur Tengah memiliki sejarah panjang yang bertentangan dengan bentuk negara republik, kawasan ini lebih akrab dengan bentuk negara monarki.

Kedua, dalam beberapa persetujuan terakhir antara Arab Saudi-Iran, Iran selalu berhasil keluar sebagai pemenang. Persitiwa pemberontakan di Bahrain pada tahun 2011 menyadarkan Arab Saudi betapa cerdasnya Iran dalam memainkan proksi-proksinya¹. Beruntungnya, intervensi militer yang dilakukan Arab Saudi berhasil mencegah pemberontakan berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Arab Saudi kemudian paham betul bahwa mereka tidak punya pilihan lain selain harus menahan ekspansi kekuatan Iran apabila ingin tetap bersaing di kawasan. Untuk melaksanakannya, Arab Saudi memastikan kembali negara-negara sekutu/aliansinya benar-benar mempertahankan perjanjian sampai dengan akhir. Arab Saudi meningkatkan partisipasi aktifnya di forum *Gulf Cooperation Council* (GCC). Upaya tersebut dimaksudkan agar negara-negara GCC mulai berani mengambil tindakan kolektif

¹ Perpanjangan tangan Iran di Bahrain

dalam menindak Konflik Suriah. Di luar GCC, Arab Saudi juga melakukan penyeimbangan hubungan dengan Mesir serta Lebanon yang selama bertahun-tahun menerima *checkbook diplomacy* Arab Saudi (Al-Shihabi, 2017).

Arab Saudi adalah salah satu pendukung utama pihak oposisi Suriah. Arab Saudi menggelontorkan berbagai bantuan mulai dari senjata, dana, pelatihan militer, dan iming-iming gaji yang lebih besar dari rata-rata pegawai pemerintah bagi pasukan FSA (Moussaoui, 2014). Ketika pada tahun 2015 Rusia mulai melakukan intervensi ke dalam Konflik Suriah demi menyelamatkan posisi Assad, Arab Saudi meningkatkan bantuan ke pihak oposisi dan menyuplai pihak oposisi dengan Rudal Anti-Tank *Tube-launched, Optically-tracked, Wire-guided* (TOW). Pada bulan Mei 2015, Arab Saudi dan Turki dikabarkan sepakat untuk memfokuskan dukungan mereka kepada Jaish al-Fatah, atau Tentara Penaklukan yang merupakan bagian dari Jabhat al-Nusra. Akibatnya, Presiden Rusia, Vladimir Putin bersama Presiden Suriah, Bashar al-Assad satu suara menuduh Arab Saudi sebagai pendukung utama terorisme di kawasan Timur Tengah (Perry, 2015).

Arab Saudi mengultimatum Suriah dengan memberikan dukungan kepada pihak oposisi karena khawatir kemenangan rezim Assad akan semakin melemahkan Arab Saudi dan sebaliknya menguatkan Iran di kawasan Timur Tengah. Khawatir akan hal ini, Dukungan Arab Saudi kepada pihak oposisi dimotivasi oleh keinginan untuk memutus hubungan aliansi antara Iran-Suriah. Merujuk kepada istilah *Sphere of Influence*, jelas disini bahwa untuk meraih hegemoni, Arab Saudi harus melemahkan Iran dengan cara memutus sekaligus merebut *Sphere of Influence* Iran di Suriah. Pergantian rezim di Suriah dari minoritas Alawit/Syiah² ke mayoritas Sunni³ akan menggeser peta politik pemerintahan. Besar kemungkinan Suriah yang dipimpin oleh Sunni lantas membuka hubungan

² Rezim Assad

³ Pihak oposisi

diplomasi dengan kerajaan Saudi, apalagi selama ini pihak oposisi akrab dengan bantuan-bantuan kerajaan. Jika hal tersebut benar-benar terjadi maka salah satu tujuan strategis Arab Saudi akan tercapai, yaitu hegemoni kawasan. Ibarat hidup dan mati, Suriah bak pertarungan yang harus ditaklukan Arab Saudi demi mencapai tujuannya strategisnya.

B. Kalkulasi Keuntungan dan Biaya Perang Proksi

Selama bertahun-tahun perang proksi dikenal sebagai alternatif yang lebih murah dibandingkan perang konvensional. Walaupun, sejarah telah membuktikan bahwa tidak selamanya perang proksi berujung kemenangan bagi pihak yang melakukannya. Jelas keputusan Arab Saudi melakukan perang proksi terhadap Iran di Konflik Suriah demi mencapai hegemoni kawasan juga didasarkan pada pertimbangan tertentu.

Untuk memulai pembahasan ini, penulis menjelaskan terlebih dahulu mengenai teori Pilihan Rasional. Menurut Graham T. Allison, teori Pilihan Rasional terbagi ke dalam tiga model, yaitu Model Aktor Rasional, Model Proses Organisasi, dan Model Politik Birokratik (Sawhani, 2018). Diantara ketiga model ini, Model Aktor Rasional adalah model yang paling tepat untuk menganalisa pertimbangan Arab Saudi melakukan perang proksi. Pada pengaplikasiannya, aktor rasional disini adalah negara—yang dari sudut pandang realis merupakan aktor utama dalam hubungan internasional, *the state-centric assumption*. Pandangan *the state-centric assumption* menyatakan bahwa negara dapat berdiri dan mengatur kehidupannya politiknya sendiri.

Lebih lanjut, Realis menerangkan perilaku negara dalam melakukan interaksi hubungan internasional digerakkan secara rasional oleh kepentingan nasional. Keinginan negara untuk *survive* dari ancaman-ancaman luar yang mengganggu keamanan nasional menjadi tolak ukur motif negara dalam menentukan kebijakan luar negerinya. Namun, tidak dapat

dipungkiri, secara alamiah negara akan selalu berupaya untuk meraih kekuatan.

Model Aktor Rasional mengamsumsikan negara sebagai aktor tunggal, artinya negara bertindak atas kesadarannya sendiri dalam proses pengambilan keputusan yang berlandaskan pada kepentingan nasional. Asumsi ini mengesampingkan peran Presiden, Perdana Menteri, Raja, atau kepala pemerintahan lainnya dalam menentukan keputusan luar negeri. Cita-cita atau dasar negara akan menjadi landasan utama dalam menentukan kepentingan nasional suatu negara. Cita-cita ini kemudian diwariskan turun temurun dari pemimpin satu ke pemimpin yang lain hingga seterusnya (Dugis, 2006). Model Aktor Rasional menyatakan negara sebagai aktor cerdas atau logis yang selalu berupaya memaksimalkan pencapaian tujuannya dengan menggunakan perhitungan untung-rugi sebelum membuat keputusan. Perhitungan ini akan menghasilkan keputusan akhir yang probabilitas keuntungannya lebih tinggi dari pada biaya yang dikeluarkan (Sawhani, 2018).

Tyrone L. Groh mendefinisikan keuntungan pada perang proksi sebagai manfaat yang diperoleh pihak ketiga dan biaya adalah apa saja yang digunakan atau dibelanjakan oleh pihak ketiga untuk mendukung proksinya (Groh, 2010, hal. 4).

Tabel 4.1 Keuntungan dan Biaya Perang Proksi

Perang Proksi	
Keuntungan	Biaya
Memerluas pengaruh pihak ketiga di dalam konflik	Meningkatnya biaya pengendalian (<i>control cost</i>) terhadap pihak lokal sebagai perpanjangan tangan
Tidak adanya korban jiwa dari pihak ketiga	Sumber daya yang terbuang untuk pihak lokal yang saling bertarung dan mati
Terhindar dari eskalasi yang tidak diinginkan pihak ketiga	Pihak ketiga kehilangan dukungan domestik
Pihak ketiga dapat menyembunyikan keterlibatannya	
Meningkatkan dukungan dari aktor negara/non-negara selaku perpanjangan tangan dari pihak ketiga	

Sumber: diambil dari berbagai sumber

Keuntungan dan biaya bisa berupa materi atau non-materi. Keuntungan dan biaya materi biasa mengacu pada sumber daya. Misalnya; pendanaan, persenjataan, penambahan pasukan, tidak adanya korban jiwa, dan lain-lain. Sedangkan keuntungan dan biaya non-materi bisa berupa legitimasi, reputasi, dan hubungan antar aktor satu dengan lainnya.

Keputusan Arab Saudi melakukan perang proksi terhadap Iran di Konflik Suriah tentu tidak terlepas dari kalkulasi keuntungan dan biaya perang proksi dalam upaya Arab Saudi

mencapai tujuan strategisnya. Perhitungan tersebut juga didasarkan pada hasil untung-rugi nya perang proksi sebagai instrumen negara, demi mencapai cita-citanya untuk meraih hegemoni kawasan. Keputusan Arab Saudi melakukan perang proksi terhadap Iran di Konflik Suriah didasarkan pada hasil berikut:

1. Keuntungan Non-materi untuk Arab Saudi

Konflik Suriah menghadapkan Arab Saudi-Iran pada situasi konflik yang tidak terhindarkan. Kedua belah pihak jelas mengambil posisi berseberangan. Hal ini menyebabkan politik kawasan memanas dan memancing negara-negara lain unjuk diri kepada siapa mereka memihak. Arab Saudi mengambil keuntungan dari situasi ini dengan menekankan bahwa melawan Bashar al-Assad sama dengan melawan terorisme terbesar abad 21. Penegasan ini membuat negara-negara lain khususnya mayoritas negara Arab berpenduduk Sunni memandang Arab Saudi sebagai pemimpin ‘umat’.

Beberapa negara-negara Teluk seperti Bahrain dan Kuwait menyuarakan dukungannya terhadap Arab Saudi. Bahrain menuduh Iran melatih ‘bibit-bibit’ terorisme. Bahrain juga merasa sangat dirugikan dengan kebijakan ekspansionis Iran yang dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas kawasan. Lalu, bersama dengan Arab Saudi, Kuwait menggelontorkan dana ratusan juta dolar untuk membiayai kelompok-kelompok ekstremis terutama Jabhat al-Nusra (BBC Monitoring, 2017). Dukungan terhadap Arab Saudi tidak hanya datang dari negara-negara Teluk, Turki, salah satu kekuatan Sunni menyampaikan melalui Presiden Recep Tayyip Erdogan “Tidak mungkin bagi masyarakat Suriah menerima seorang diktator yang telah menyebabkan kematian 350.000 orang” (BBC, 2015).

Turki bersama dengan Arab Saudi telah menjalin hubungan yang kuat demi melawan kediktatoran Assad. Turki sampai mengizinkan koalisi pimpinan Amerika Serikat menggunakan pangkalan militernya untuk menyerang Suriah pada serangan

bom bulan Juli 2015 (BBC, 2015). Belum lagi, negara-negara Barat yang tergabung dalam koalisi yang dipimpin Amerika Serikat juga sepakat bahwa Bashar al-Assad harus dijatuhkan karena pelanggaran terhadap hak asasi manusia sudah tidak dapat ditoleransi.

Amerika Serikat diketahui memberikan bantuan militer terbatas kepada pihak oposisi moderat. Sekretaris Pers Pentagon, Laksamana Muda John Kirby menegaskan Amerika Serikat dan negara-negara lainnya akan terus berkomitmen mengawal Konflik Suriah. Amerika Serikat masih terus memimpin intervensi militer ke Suriah hingga sekarang. Pada Februari 2018, Amerika Serikat bertanggung jawab atas peluncuran serangan udara dan tembakan artileri terhadap pasukan Suriah di sebelah Timur provinsi Deir al-Zor. Sehubungan dengan pengingkaran Iran terhadap perjanjian nuklir dibawah kepemimpinan Obama di Konflik Suriah, Presiden Trump bersumpah tidak akan segan dan akan mengambil tindakan keras untuk memberikan sanksi kepada Iran (Associated Press The National, 2018).

Aktor non-negara pun tidak tinggal diam, Jabhat al-Nusra bergabung ke dalam konflik untuk menurunkan Assad dari kursi kepemimpinannya. Bergabungnya Jabhat al-Nusra memberikan dampak signifikan terhadap kekuatan oposisi (Geneva International Centre for Justice, 2017). Kelompok ini bertanggung jawab atas 600 serangan di beberapa kota Suriah seperti Damaskus, Aleppo, Hama, Daraa, Homs, Idlib, dan Deir al-Zor serta berhasil menundukkan kembali wilayah-wilayah vital di Suriah. Akhir tahun 2015 lalu, Arab Saudi mengadakan pertemuan dengan pihak oposisi Suriah yang menghasilkan komitmen bersama untuk menjatuhkan rezim Assad. Masih di tahun yang sama, Arab Saudi bersama dengan 34 negara lainnya membentuk "*Islamic Military Coalition*" demi melawan kekuatan aliansi Rusia-Iran di Suriah.

Arab Saudi sangat diuntungkan oleh dukungan-dukungan dari berbagai aktor negara dan non-negara di atas. Bahkan

Media Barat melabeli Bashar al-Assad sebagai diktator tidak berperikemanusiaan. Dukungan-dukungan tersebut menjadikan Arab Saudi terlegitimasi sebagai salah satu kekuatan regional yang tidak terbantahkan, karena itulah Arab Saudi melakukan perang proksi terhadap Iran di Suriah. Keputusan ini membuat banyak pihak menjadi sekutunya dalam upaya membendung hegemoni Iran melalui Suriah. Keadaan tersebut sama sekali tidak menguntungkan Iran. Usaha Iran mempertahankan Bashar al-Assad menjadikannya musuh bersama negara-negara Barat, negara demokrasi, Dunia Arab, sekaligus kelompok-kelompok militan anti-Assad.

2. Kerugian Materi untuk Iran sekaligus Suriah

Secara materi, Arab Saudi memang tidak memiliki kapasitas militer yang cukup untuk melancarkan serangan secara langsung kepada Suriah. Namun, Arab Saudi memanfaatkan dengan baik kelompok militansi yang merupakan pihak oposisi pemerintah Suriah melalui penyaluran bantuan dana. Kedutaan Besar Arab Saudi di Washington DC mengatakan “Uang akan menyelamatkan nyawa, membangun kembali fasilitas pengungsi, dan memastikan ISIS sekaligus Assad dikalahkan” (Associated Press VOA, 2018).

Sejak Konflik Suriah berlangsung pada tahun 2011, Arab Saudi yang secara aktif melakukan perang proksi, tidak menderita korban ataupun kerugian secara langsung di kubu Arab Saudi. Padahal Konflik Suriah terus menimbulkan kerusakan. Statista menunjukkan ada lebih dari US\$ 28 miliar kerugian ekonomi yang diderita pemerintah Suriah dan sekitar 22.8% tempat tinggal telah rusak (Statista, t.thn.). Iran dengan 13,000 pasukannya di Suriah, diperkirakan oleh berbagai sumber menghabiskan biaya pemeliharaan mencapai US\$ 3 miliar per tahunnya untuk menggaji dan mengurus prajuritnya. Biaya tadi belum termasuk biaya persenjataan yang apabila ditambahkan maka rata-rata per tahunnya Iran bisa menghabiskan sekitar US\$ 12,7 miliar (Asharq al-Awsat, 2018).

Dilansir dari beberapa sumber, jumlah pasukan militer pro pemerintah yang jatuh—tentara Suriah, polisi Suriah, dan pasukan Iran (Human Rights Watch, 2017), militansi Suriah (SOHR, 2014), Hizbullah (The Soufan Group, 2018)—mencapai 124,578-178,913 jiwa. Dari ratusan ribu tentara yang tewas, 2100 diantaranya merupakan petugas berpangkat tinggi seperti Jenderal (The Independent, 2013). Bahkan menurut SOHR, jumlah sebenarnya bisa dua kali lipat dari jumlah yang berhasil didokumentasikan.

Jumlah ini tidak hanya menunjukkan angka kematian, lebih dari itu jumlah ini juga menunjukkan betapa besar kerugian yang sudah diderita pihak-pihak pro pemerintah Suriah. Sedangkan jumlah korban dari kubu anti-pemerintah, yaitu pihak oposisi yang berasal dari berbagai kelompok mulai dari FSA, Jabhat al-Nusra, dan lain-lain mencapai angka 129,277-180,277 jiwa (The Soufan Group, 2018). Sudah jadi hitung-hitungan umum kalau semakin sedikit jumlah pasukan yang tersisa semakin lemah negara tersebut. Bagi Arab Saudi skenario ini sangat menguntungkan. Tanda-tanda melemahnya Suriah sebenarnya sudah terlihat sejak tahun 2015, jika bukan karena bantuan Rusia, rezim Assad mungkin sudah tumbang. Tidak dapat diperkirakan sampai kapan Rusia akan terus mendukung Suriah. Jelas dengan situasi konflik sekarang, Arab Saudi harus bersabar dengan terus mendukung proksinya.

Perbandingan antara keuntungan yang di dapat dan biaya yang dikeluarkan dari pelaksanaan perang proksi di Konflik Suriah jelas lebih banyak merugikan Iran sekaligus Suriah. Iran dan Suriah harus kehilangan banyak sekali materi mulai dari korban jiwa dan infrastruktur. Di sisi lain, dengan tolak ukur yang sama, Arab Saudi tidak menderita kerugian materi sebegitu besarnya. Adapun satu-satunya biaya yang harus dikeluarkan Arab Saudi adalah pendanaan pihak oposisi. Itupun hasil yang didapatkan oleh Arab Saudi melalui keuntungan non-materi jauh dari kata tidak memuaskan. Perang proksi menguntungkan Arab Saudi karena tanpa harus turun tangan secara langsung dan hanya melancarkan aksi dari balik layar,

Arab Saudi dapat melemahkan hegemoni Iran sekaligus memperkuat hegemoninya sendiri di kawasan dengan biaya yang 'murah'.